

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori *Rational Actor Model* milik Graham T. Allison mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yakni mengapa Yunani meresmikan *International Protection and Other Provision*. Data yang penulis himpun didasari oleh variabel- variabel yang digunakan dalam menganalisis rasionalitas suatu kebijakan, yakni *national actor, the problems, static selection*, serta *action as rational choice* yang terdiri dari *goals and interest, alternatives, consequences*, dan *action*.

Pada variabel *national actor*, penulis merunut aspek historis Yunani dengan migrasi internasional. Data yang dihimpun penulis menunjukkan bahwa sebelum Yunani menjadi negara penerima pencari suaka, Yunani merupakan negara pengirim migran yang cukup tinggi di abad ke 19 sebagai akibat dari krisis perekonomian serta dinamika perpolitikan Yunani. Hal ini berangsur-angsur berubah ketika kontestasi politik di Yunani mulai stabil, serta bergabungnya Yunani ke Uni Eropa. Lalu, apabila mengacu pada partai- partai yang menduduki pemerintahan di Yunani, perbedaan aliran tidak terlalu mempengaruhi arah kebijakan penanganan pencari suaka di Yunani. Hal ini dikarenakan oleh perspektif Yunani yang sedari awal telah skeptis kepada para pendatang, baik migran ekonomi maupun pencari suaka. Pendikotomian individu telah terjadi sejak kebijakan imigrasi pertama diresmikan pada tahun

1991. Perspektif ini kemudian berlanjut dalam peresmian kebijakan- kebijakan selanjutnya.

Pada variabel permasalahan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dari sektor eksternal dan internal yang mendesak Yunani untuk segera menemukan solusi agar tidak semakin rumit di kemudian hari. Permasalahan pertama dari pihak eksternal adalah *burden shifting* atau pengalihan tanggungjawab terhadap penanganan pencari suaka. Yunani sebagai pintu masuk migran ke wilayah- wilayah Eropa lain, diharuskan untuk meregistrasi, memberikan perlindungan sementara, serta menghalau individu- individu tersebut untuk bepergian ke negara- negara lainnya menggunakan privilese Area Schengen. Namun di sisi lain, Yunani juga perlu memberikan perlindungan sesuai dengan prinsip Konvensi 1951 serta aturan *Common European Asylum System* yang dianut Yunani sebagai negara anggota dan ratifikator.

Lalu, permasalahan kedua adalah kerjasama *EU-Turkey Deal* yang menempatkan Yunani sebagai penampung sementara sekaligus penerima, karena pencari suaka hanya bisa melakukan permohonan suaka di tempat dimana ia datang kecuali memiliki keluarga yang terpisah di negara Eropa lainnya. Kerjasama ini membuat para pengungsi menunggu permohonan suaka tanpa kepastian di beberapa *Reception and Identification Center*, yang kemudian menyebabkan permasalahan baru, yakni overpopulasi di *hotspots* Yunani.

Overpopulasi juga merupakan salah satu permasalahan dari sektor internal, penumpukan pencari suaka tidak dibarengi dengan kemampuan Yunani memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini menimbulkan ancaman- ancaman baru seperti rasa ketidakamanan para pencari suaka, khususnya para pencari suaka perempuan. Tentu saja hal ini menyalahi hak- hak yang seharusnya diterima oleh pencari suaka. Namun, lagi- lagi Yunani pun kewalahan dan terhalang oleh sumber daya yang dimiliki, salah satunya adalah dana yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang dialami Yunani. Ketidakpastian kebutuhan dana yang sewaktu- waktu bisa melonjak dikhawatirkan berpengaruh pada pemberian perlindungan kepada pencari suaka.

Kemudian pada variabel *static selection*, Perdana Menteri Yunani beberapa kali menekankan tentang perlu adanya kesamarataan dalam pembagian tanggungjawab terhadap penanganan suaka. Perdana Menteri Yunani juga menyatakan bahwa kebijakan ini diresmikan dalam rangka menghalau migran gelap yang tidak membutuhkan perlindungan internasional untuk menyusupi Yunani.

Terakhir pada variabel *action as rational choice*, penulis mengkalkulasikan beberapa variabel lagi yakni *goals and interest*, yang penulis himpun dari *explanatory memorandum International Protection and Other Provision*. Kemudian penulis mengidentifikasi dua alternatif kemungkinan yang akan dilakukan Yunani, yakni meresmikan *International Protection and Other Provisions* atau tidak meresmikan kebijakan tersebut, dengan kata lain Yunani tetap menggunakan kebijakan sebelumnya. Penulis kemudian mengidentifikasi

masing- masing konsekuensi yang didapatkan dari dua alternatif tersebut, dan ditemukan bahwa kedua pilihan memiliki konsekuensi yang hampir sama, namun peresmian *International Protection and Other Provisions* adalah keputusan yang paling banyak menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Yunani. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa peresmian *International Protection and Other Provisions* merupakan kebijakan paling rasional yang dipilih Yunani dalam menyelesaikan permasalahannya.

4.2 Saran

Kebijakan *International Protection and Other Provisions* memang merupakan kebijakan yang paling memenuhi tujuan utama Yunani, yakni pemilahan migran demi menghindari penyusupan migran yang tidak membutuhkan perlindungan internasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis menemukan beberapa substansi dari kebijakan ini kurang berpihak pada pencari suaka dan tidak memberikan pilihan lain bagi pencari suaka. Selain itu, kebijakan ini masih dipenuhi skeptisme terhadap para pendatang seperti kebijakan- kebijakan sebelumnya, terlihat dari konten kebijakan yang berfokus pada *transfer of asylum*. Artinya, Yunani masih memiliki anggapan bahwa mayoritas pencari suaka sudah tidak membutuhkan perlindungan, atau telah mendapatkan perlindungan yang layak di negara penerima sebelumnya.

Sehingga, terkait dengan penelitian selanjutnya, penulis berharap bagi peneliti yang hendak mengkaji ulang kebijakan- kebijakan penanganan pencari suaka yang diresmikan oleh Yunani mengkaji ulang perjalanan Yunani dalam

menangani krisis pencari suaka. Selain itu, penulis berharap peneliti lain mendapatkan hasil apakah *International Protection and Other Provisions* berhasil diimplementasikan secara integratif oleh pemerintah Yunani atau kembali dirombak dengan kebijakan baru yang lebih komprehensif lagi untuk lebih mengakomodir kebutuhan pencari suaka. Sehingga kemudian dapat dipetakan kesalahan Yunani dalam meresmikan kebijakan penanganan pencari suaka, apakah dari implementasinya atau memang dari substansi awal kurang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Yunani.